

ABSTRAK

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) adalah usaha perdagangan yang dikelola oleh badan usaha atau individu yang merujuk pada usaha ekonomi produktif. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah istilah yang diterjemahkan oleh *World Intellectual Property Organization (WIPO)* sebagai "kekayaan intelektual", yang berarti semua ciptaan yang dihasilkan melalui kemampuan intelektual, seperti penemuan, tulisan, dan karya seni.

Studi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pendaftaran merek berdampak pada produk Usaha Mikro Kecil Menengah di Kota Semarang dan bagaimana pemerintah Kota Semarang berusaha dan menghadapi kesulitan dalam mengakomodasi pendaftaran merek. Dalam penelitian ini, metodologi penelitian hukum empiris digunakan dengan sumber hukum sekunder, yang terdiri dari literatur, makalah, dan referensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pendaftaran merek UMKM memiliki beberapa peringan biaya.

Pendaftaran merek UMKM telah difasilitasi oleh pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Koperasi UMKM Kota Semarang Koperasi. Namun, ada beberapa kendala yang dihadapi oleh fasilitator dan pelaku UMKM, seperti kurangnya minat pelaku UMKM untuk mendaftarkan merek mereka dan proses pendaftaran yang cukup lama. Beberapa pelaku UMKM mungkin tidak menyadari peran penting yang dimainkan oleh pemerintah untuk membantu mereka mendaftarkan merek mereka.

Kata Kunci: HKI, Merek, UMKM

Micro, small and medium enterprises (MSMEs) are trading businesses managed by business entities or individuals which refer to productive economic enterprises. Intellectual Property Rights (IPR) is a term translated by the World Intellectual Property Organization (WIPO) as "intellectual property", which means all creations produced through intellectual abilities, such as inventions, writings and works of art.

This study aims to find out how brand registration impacts the products of Micro, Small and Medium Enterprises in Semarang City and how the Semarang City government tries and faces difficulties in accommodating brand registration. In this research, empirical legal research methodology is used with secondary legal sources, consisting of literature, papers and references. The research results show that the MSME brand registration process has several cost reductions.

MSME brand registration has been facilitated by the Semarang City government through the Semarang City MSME Cooperative Service. However, there are several obstacles faced by facilitators and MSME actors, such as the lack of interest of MSME actors to register their brands and the registration process is quite long. Some MSMEs may not be aware of the important role played by the government in helping them register their brands.

Keywords: IPR, Trademark, MSME